

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM RANGKA PENATAAN PASAR TRADISIONAL DAN PASAR MODERN DI KABUPATEN JEPARA

DEVI EVIFANI TURNIP

(ILMU PEMERINTAHAN FISIP UNDIP SEMARANG)

ABSTRAKSI

Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam rangka penataan pasar tradisional dan pasar modern di Kabupaten Jepara memiliki tujuan untuk mengetahui proses implementasi kebijakan dalam melakukan perlindungan pasar tradisional dan penataan pasar modern, untuk mengetahui, mengetahui upaya dalam melakukan pemberdayaan pedagang tradisional dan mengetahui pelaksana kebijakan dalam melakukan perlindungan terhadap pasar tradisional dan penataan pasar modern.

Metode pelaksanaan dalam penelitian ini menggunakan penelitian deksriptif kualitatif dengan jenis data utama adalah kata-kata dan tindakan. Sumber data yang didapatkan berasal dari data primer dan sekunder. Untuk mencari informan dalam penelitian ini dilakukan dengan sistem *purposive sample* (pengambilan dengan sengaja) dan *accidental sampling* (pengambilan dengan ketidaksengajaan saat bertemu di lokasi penelitian). Teknik untuk mengumpulkan data nanti dengan menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumen.

Penataan pasar tradisional dan Pasar modern di Kabupaten Jepara merupakan salah satu kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk melakukan penataan pasar tradisional dan pasar modern, akan tetapi pada kenyataannya dalam proses pengimplementasian kebijakannya tidak sesuai dimana masih terdapat pasar-pasar tradisional yang belum tertata dengan baik dan keberadaan pasar modern yang semakin banyak dan berdekatan dengan pasar tradisional membuat beberapa pedagang mengeluh karena pendapatan mereka menjadi menurun. Penataan pasar Tradisional belum terlaksana dengan baik dikarenakan anggaran yang belum memadai dan sumberdaya manusia yaitu pedagang tradisional yang masih sulit untuk ditata, hal tersebut dikarenakan tidak adanya program-program pemberdayaan untuk pedagang Tradisional untuk meningkatkan kualitas penataan pasar Tradisional sehingga eksistensi pasar tradisional tidak terkalahkan dengan hadirnya pasar modern di Kabupaten Jepara.

Kata Kunci : Kebijakan Pemerintah, Penataan Pasar Tradisional dan Pasar Modern

IMPLEMENTATION OF LOCAL GOVERNMENT POLICY IN THE FRAMEWORK OF TRADITIONAL MARKETS ARRANGEMENT AT DISTRICT OF JEPARA

DEVI EVIFANI TURNIP

(ILMU PEMERINTAHAN FISIP UNDIP SEMARANG)

ABSTRACT

Implementation of Local Government in the framework of the arrangement of traditional markets and modern markets in Jepara regency has the aim to determine the policy implementation process in protecting traditional markets dam arrangement of the modern market, to know, to know the effort to empower traditional traders and knowing implementing policies in protecting against traditional markets and modern markets structuring.

Methods of execution in this study using a qualitative descriptive study with primary data types are the words and actions. Sources of data obtained derived from primary and secondary data. To search for informants in this study is conducted with a purposive sample (making intentional) and accidental sampling (sampling by accident when he met at the study site). Techniques for collecting data later using interviews, observation and documents.

Structuring traditional market and modern market in Jepara district is one of the government's policy which aims to make the arrangement of traditional markets and modern markets, but in fact in the process of implementing its policies are not appropriate where there is still a traditional market that is not well ordered and market presence more modern and within walking distance of traditional markets made some traders complained because their incomes to decrease. Structuring the market Traditional has not done well because the budget is not adequate and human resources that traditional traders still difficult to style, it is because the absence of development programs for merchants Traditional to improve the quality of the arrangement of the market Traditional hence the existence of traditional markets unbeaten with presence modern market in the district of Jepara

Keywords: Government Policies, Markets Structuring Traditional and Modern Markets

1. Pendahuluan

Kesejahteraan merupakan salah satu aspek penting didalam kehidupan masyarakat yang mana hal itu juga akan berpengaruh kepada pertumbuhan ekonomi daerah tersebut. Sebagaimana kita tahu bahwa peran pemerintah daerah yang paling utama yaitu mensejahterkan kehidupan masyarakatnya terlebih lagi dalam sektor pekerjaan. Jika dilihat dari aspek pertumbuhan ekonominya Kabupaten Jepara sendiri menempati 5,77%, sedikit lebih rendah dibandingkan pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah sebesar 5,8%. Hal tersebut dikarenakan lapangan pekerjaan yang disediakan masih sedikit sehingga karena keterbatasan tersebut membuat tingkat kemiskinan di Kabupaten Jepara tinggi. Berdasarkan Data Badan Pusat dan Statistik menyatakan bahwa kemiskinan masyarakat Jepara pada tahun 2014 mencapai 36% dimana dari 1.123439 Jiwa terdapat 405.005 jiwa yang masuk dalam kategori masyarakat miskin. Sehingga hal tersebut yang membuat laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Jepara masih belum maksimal.

Dengan melihat kenyataan yang ada maka diperlukan kebijakan yang mengatur keberadaan sektor-sektor yang menghambat pertumbuhan ekonomi masyarakat salah satunya adalah keberadaan Pasar Modern yang saat ini membuat masyarakat yang bekerja di sektor informal khususnya di Pasar Tradisional pendapatannya menjadi menurun, sedangkan hampir 13.000 masyarakat Kabupaten Jepara pekerjaannya berdagang di Pasar Tradisional. Menurut Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jepara keberadaan Pasar Modern setiap tahunnya mengalami peningkatan dari tahun 2006-2012 berkisaran 23 pasar modern dan Tahun 2013 - 2014 keberadaan Pasar Modern

makin meningkat sampai 28 pasar modern. Sedangkan keberadaan pasar Tradisional jumlahnya hanya 21 saja, dibandingkan Pasar Modern yang jumlahnya hingga saat ini 51

Kabupaten Jepara memiliki beberapa jumlah pasar yang di kelola oleh Dinas Koperasi,UMKM dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Jepara. Pasar-Pasar yang ada memiliki klasifikasi-klasifikasi pasar yang dibedakan menjadi tiga kelas yaitu kelas A,Kelas B dan Kelas C

Adapun pasar-pasar yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Jepara berdasarkan klasifikasi kelas pasar adalah:

Tabel 1.1

Klasifikasi Pasar

KELAS A	KELAS B		KELAS C
1. Pasar Jepara Satu	1. Pasar Welahan	6. Pasar Ngabul	1. Pasar Krasak
2. Pasar Bangsri	2. Pasar Mlonggo	7. Pasar Mindahan	2. Pasar Daren
3. Pasar Jepara II	3. Pasar Kelet	8. Pasar Bugel	3. Pasar Rahayu
4. Pasar Pecangaan	4. Pasar Keling	9. Pasar Lebak	4. Pasar Pengkol
5. Pasar Mayong	5. Pasar Tahunan	10. Pasar Tanggulasi	5. Pasar TPI
6. Pasar Kalinyamatan			

Sumber : Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Jepara

Meningkatnya keberadaan Pasar Modern membuat keresahan bagi masyarakat yang bekerja di sektor informal. Hal ini lah yang harus diperhatikan oleh Pemerintah

Kabupaten Jepara untuk melakukan penataan keberadaan Pasar Tradisional dan Pasar Modern yang telah tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomer 3 Tahun 2010 .Bila dikaji lebih lanjut pada dasarnya aturan-aturan keberadaan Pasar modern sudah di muat dalam Perda tersebut hanya saja Pemerintah perlu meninjau kembali apakah pengimplementasian kebijakan tersebut telah sesuai atau masih ada ketidaksesuaian dalam pelaksanaannya

Kebijakan Pemerintah Daerah yang telah dibuat tidak berhasil hal ini dikarenakan Pemerintah daerah tidak begitu berhasil karena ada beberapa Peraturan yang telah dibuat didalam Perda tidak sesuai dengan kenyataan yang ada dilapangan hingga pada akhirnya pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara melakukan revisi terhadap Perda yang ada. Perkembangan Pasar Modern yang semakin merajalela hingga ke pemukiman masyarakat membuat banyak para pedagang tradisional dan kios-kios yang ada setiap harinya pendapatannya

1. Teori dan Metoda

2.1 Teori

Permasalahan yang terjadi di Kabupaten Jepara adalah ketidaksesuaian Kebijakan Pemerintah Daerah yang dibuat dalam rangka Penataan Pasar Tradisional dan Pasar Modern di Kabupaten Jepara dengan kenyataan yang ada dilapangan,dimana Penataan Pasar Tradisional yang belum sesuai dan keberadaan pasar modern yang mempengaruhi aktivitas ekonomi yang ada didalam Pasar Tradisional.

Pada penelitian ini fokusnya mengenai Pengimplementasian Kebijakan tersebut yang berguna untuk kepentingan publik. Implementasi kebijakan publik

merupakan salah satu tahapan dari proses kebijakan publik bersifat krusial karena bagaimanapun baiknya suatu kebijakan, kalau tidak dipersiapkan dan direncanakan secara baik dalam implementasinya, maka tujuan kebijakan tidak akan bisa diwujudkan. Demikian pula implementasi kebijakan, kalau tidak dirumuskan dengan baik maka tujuan kebijakan juga tidak bisa diwujudkan.

Menurut Donald S. Van Meter dan Carl E. Va (1974:447) dalam buku Analisis Kebijakan Publik menjelaskan bahwa implementasi kebijakan menekankan pada suatu tindakan, baik yang dilakukan oleh pihak pemerintah maupun individu (atau kelompok) swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu kebijakan sebelumnya. Pada suatu saat tindakan-tindakan ini, berusaha mentransformasikan keputusan-keputusan menjadi pola-pola operasional serta melanjutkan usaha-usaha tersebut untuk mencapai perubahan, baik besar maupun kecil yang diamanatkan oleh keputusan-keputusan kebijakan tertentu.

Menurut Sabatier (1986:268) ada enam variabel utama yang dianggap memberi kontribusi keberhasilan atau kegagalan implementasi, diantaranya adalah;

- a. Tujuan atau sasaran kebijakan yang jelas dan konsisten
- b. Dukungan teori yang kuat dalam merumuskan kebijakan
- c. Proses Implementasi memiliki dasar hukum yang jelas sehingga menjamin terjadi kepatuhan para petugas dilapangan dan kelompok sasaran
- d. Komitmen dan keahlian para pelaksana kebijakan

- e. Dukungan para *stakeholder*
- f. Stabilitas kondisi sosial, ekonomi dan politik.

1.2 Metoda

Pada penelitian tentang Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam rangka Penataan Pasar Tradisional dan Pasar Modern di Kabupaten Jepara menggunakan tipe penelitian deskriptif kualitatif.

Subjek penelitian diantaranya adalah pihak yang terlibat dalam pengelolaan pasar yaitu Dinas Koperasi, UMKM dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Jepara dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jepara. Menurut Bogdan dan Taylor dalam buku Memahami Penelitian Kualitatif mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.¹ Teknik pengambilan informan dengan sistem *purposive sample* (pengambilan dengan sengaja) untuk memperoleh *key informan* (orang-orang yang mengetahui dengan benar dan terpercaya).

Jenis data pada penelitian ini merupakan Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari informan atau objek yang diteliti, atau ada hubungannya dengan yang diteliti². Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Untuk memperoleh data primer ini dilakukan interview atau wawancara dengan instansi dan para pejabat yang terkait. Sedangkan Data Sekunder adalah data yang telah lebih dahulu dikumpulkan dan dilaporkan oleh

¹Basrowi. *Memahami Penelitian Kualitatif*. PT Rineka Cipta. Jakarta. 2008. Hal 20-21

² Moh. Pabundu Tika, 2005, *Metode Penelitian Geografi*, Hal 44

orang atau instansi di luar dari peneliti sendiri, walaupun yang dikumpulkan itu sesungguhnya adalah data yang asli.³. Dalam teknis pelaksanaan pengumpulan data, peneliti akan menggunakan beberapa metode untuk mendapatkan informasi yang jelas. Metode tersebut diantaranya wawancara mendalam (*indepth interview*), dokumen dan observasi.

Data yang sudah terkumpul kemudian diolah untuk kemudian dijadikan susunan yang padu dalam penelitian kualitatif. Setelah data terkumpul, peneliti akan melakukan pemilahan dan penyusunan klasifikasi data. Mana data yang memang diperlukan dalam menunjang kasus ini, dan mana yang tidak menunjang data ini. Kemudian setelah dilakukan proses pemilahan, akan dilakukan pemberian kode data untuk membangun kinerja analisis data. Setelah itu melakukan pendalaman data dan langkah terakhir adalah melakukan analisis data sesuai dengan konstruksi pembahasan hasil penelitian nantinya. Dalam melakukan analisis data adalah dengan cara reduksi data, lalu data disajikan dan dari data yang disajikan tersebut ditarik kesimpulan.

2. Hasil Penelitian

3.1 Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomer 3 Tahun 2010

Latar belakang munculnya kebijakan mengenai penataan Pasar Tradisional dan Pasar Modern ini dikarenakan banyaknya pasar-pasar modern yang

³ *ibid* hal 44

bermuncul-munculan dekat dengan Pasar Tradisional dan letaknya belum teratur. Pada Tahun 1995 aturan mengenai Pasar Modern sudah pernah diatur akan tetapi aturan yang dibuat masih belum sesuai dengan kenyataan yang ada, sehingga dibuatlah aturan yang tegas supaya pendirian pasar modern di setiap daerah tidak berdekatan dengan pasar Tradisional. Sehingga hal tersebutlah yang melatarbelakangi dirumuskannya Peraturan Daerah yang mengatur mengenai Pasar Tradisional dan Pasar Modern, agar keberadaan pasar Modern tidak mengganggu aktivitas ekonomi pada Pasar-Pasar Tradisional yang ada di Kabupaten Jepara.

Proses Implementasi Kebijakan ini terhambat dikarenakan beberapa factor diantaranya ada beberapa diantaranya adalah Tujuan sasaran kebijakan yang dimana didalam Peraturan Daerah untuk melakukan Penataan Pasar Tradisional dan Pasar modern dapat sesuai akan tetapi kenyataan yang ada dilapangan yang terjadi tujuan penataan tersebut belum berjalan dengan baik dan sasaran dari kebijakan tersebut adalah pedagang tradisional ,namun pedagang tradisional di Kabupaten Jepara tidak merasakan penataan pasar yang sesuai dengan keinginan mereka. Disisi lain Kurangnya komitmen dan Kepatuhan Pelaksana Kebijakan juga mempengaruhi proses pengimplementasian kebijakan tersebut. Kecenderungan perilaku atau karakteristik dari pelaksana program berperan penting untuk mewujudkan implementasi program yang sesuai dengan tujuan atau sasaran. Karakter penting yang harus dimiliki oleh pelaksana kebijakan misalnya kejujuran dan komitmen yang tinggi. Komitmen yang tinggi dari pelaksana kebijakan, akan

membuat mereka selalu antusias dalam melaksanakan tugas, wewenang, fungsi dan tanggungjawab sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan

Selain itu Hubungan antara pelaksana kebijakan dengan pedagang Tradisional juga terlihat masih kurang sehingga hal tersebut menjadi salah satu penghambat dilakukan penataan pasar Tradisional di Kabupaten Jepara.

3.2 Pemberdayaan Pedagang Tradisional

Kenyataan yang ada di lapangan ditemukan bahwa Dinas Pasar masih belum optimal melaksanakan program pemberdayaan untuk pedagang tradisional. Pihak Dinas pasar merasa kesulitan untuk melaksanakan program untuk pemberdayaan pedagang disebabkan kualitas sumber daya manusianya masih rendah, masih terdapat pedagang-pedagang yang susah diatur. Hal itu bisa dilihat banyak pedagang-pedagang tradisional yang tidak mau mengikuti setiap program penataan pasar dan melanggar aturan-aturan yang ada didalam pasar.

Jika program pemberdayaan untuk pedagang tradisional dilakukan secara serius, maka itu akan membuat kemajuan dan keberhasilan Pasar Tradisional. Dan Dampak positifnya akan meningkatkan Pendapatan asli Daerah tersebut. Akan tetapi Pemberdayaan Pedagang di Kabupaten Jepara belum bisa dijalankan dengan maksimal, sehingga kualitas sumber daya manusianya pun belum bisa dikatakan meningkat dan hasilnya tidak begitu ada kemajuan yang terlihat dari Pasar Tradisional di Kabupaten Jepara.

Pendapatan yang dihasilkan oleh Pasar Tradisional untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jepara juga tidak begitu tinggi

Tabel 3.1

Penerimaan Retribusi Pasar dan Kontribusi Retribusi Pasar terhadap PAD

Kabupaten Jepara Tahun 2010-2014 (Ribu Rupiah)

No.	Tahun Anggaran	Retribusi Pasar se Kabupaten Jepara	PAD	Kontribusi (%)
1.	2010	2.552.792.400	84.734.935.696	3.01
2.	2011	2.433.700.325	101.642.014.200	2.35
3.	2012	2.446.541.800	129.076.540.089	1.89
4.	2013	2.504.044.950	133.778.055.195	1.87
5.	2014	2.481.992.000	231.673.059.919	1.07
Rata-rata tahun				2.04

(Sumber : Data PAD Badan Perencanaan Daerah tahun 2010-2014)

3.3 Perlindungan Pasar Tradisional terhadap Pasar Modern

Setiap tahun keberadaan pasar modern semakin bertambah hingga di pelosok-pelosok desa keberadaannya dan itulah yang meresahkan kehidupan beberapa masyarakat yang mereka bekerja disektor informal. Berikut kita dapat melihat perkembangan Pasar Modern setiap tahunnya yang semakin banyak

Tabel 3.4

Data Jumlah Pasar Modern Kabupaten Jepara

No	Tahun	Jumlah
----	-------	--------

1.	2006	3
2.	2007	6
3.	2008	9
4.	2009	2
5.	2010	6
6.	2011	6
7.	2012	2
8	2013	9
9.	2014	11

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jepara

Kehadiran pasar modern yang menjalar diberbagai tempat membuat beberapa pasar tradisional dan toko-toko klontong merasa tersaingi dengan kehadiran pasar modern.Setiap orang memiliki hak untuk memilih kemana mereka akan berbelanja,dan ini tergantung bagaimana pasar tradisional dan toko-toko klontong mampu bersaing dengan pasar modern.

Bahwasannya perlindungan untuk Pasar Tradisional tidak diatur didalam Peraturan Daerah Nomer 3 Tahun 2010. Ini merupakan menjadi suatu keanehan dimana ketika dilakukan Penataan Pasar Tradisional,Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern harus disertai perlindungan

4 Pembahasan

Garis besar dari hasil penelitian jika di korelasikan dengan teori inti implementasi kebijakan, ,maka terdapat beberapa kondisi yang berjalan tidak sesuai dengan apa yang seharusnya. Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Rangka Penataan Pasar Tradisional dan Pasar Modern di Kabupaten Jepara tidak sesuai dengan teori yang digunakan berkaitan dengan proses implementasi

kebijakan. Dalam hal ini ada beberapa indikator yang berkaitan keberhasilan dari pengimplementasian kebijakan diantaranya Tujuan dan Sasaran Kebijakan didalam Peraturan Daerah Nomer 3 tahun 2010 belum sesuai dengan kenyataan di lapangan dimana masih banyaknya pasar Tradisional yang belum dilakukan Penataan dan Pasar Modern yang keberadaannya masih berdekatan dengan pasar Tradisional dengan jumlahnya yang semakin meningkat setiap tahunnya. Selain itu Hubungan pelaksana Kebijakan berpengaruh terhadap keberhasilan pengimplementasian kebijakan, namun yang terjadi hubungan antara pelaksana kebijakan dan pedagang Tradisional belum baik sehingga hal tersebut menghambat pelaksana kebijakan untuk melakukan Penataan Pasar Tradisional di kabupaten Jepara, namun disini ada hal yang aneh pihak pelaksana kebijakan menjelaskan bahwa hubungan mereka dengan pedagang Tradisional selalu baik tetapi proses melakukan penataan pasar juga dijelaskan terhambat dengan sumberdaya manusia. Dari situ terlihat bahwa pihak pelaksana kebijakan kurang melakukan pendekatan kepada pedagang-pedagang tradisional di Kabupaten Jepara. Komitmen dan Kepatuhan pelaksana kebijakan untuk melakukan penataan pasar Tradisional masih dianggap kurang sehingga penataan pasar tradisional di kabupaten jepara masih jauh tertinggal jika dibandingkan dengan daerah yang lainnya. Sedangkan sebagaimana kita tahu bahwa sektor informal termasuk pasar tradisional berperan penting untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Oleh karena itu perlu dilakukan penataan pasar Tradisional dan Pasar Modern sehingga sektor pasar tradisional tidak terganggu dengan hadirnya pasar modern, selain itu diperlukan pemberdayaan kepada para pedagang tradisional

untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada di dalam pasar tersebut, sehingga pasar tradisional mampu bersaing dengan pasar modern.

5 Kesimpulan

Permasalahan dalam proses pengimplementasian Kebijakan Penataan Pasar Tradisional dan Pasar Modern di Kabupaten Jepara terletak pada kurangnya Penataan terhadap Pasar Tradisional di Kabupaten Jepara sehingga itu membuat keberadaan Pasar Tradisional menurun dan keberadaan pasar modern makin bertambah. Kondisi Penataan yang seperti itu disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor yang pertama adalah tidak adanya Naskah Akademik dalam Peraturan Daerah Nomer 3 Tahun 2010 sehingga tidak adanya dasar yang jelas mengenai peraturan pembuatan jarak dan Lokasi Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dan kurangnya sosialisasi dari pihak Dinas dan pengelola pasar mengenai Peraturan Daerah nomer 3 Tahun 2010 mengenai Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern kepada pedagang-pedagang Tradisional di setiap pasar. Hal tersebut terbukti dari hasil wawancara kepada pedagang-pedagang tradisional bahwa mereka tidak pernah mengerti mengenai aturan tersebut.

Kedua, masih kurangnya komitmen pelaksana kebijakan untuk melakukan penataan Pasar Tradisional, hal itu terlihat dari kondisi beberapa pasar Tradisional di Kabupaten Jepara yang masih sangat kurang dari sisi fisik dan non fisik pasar. Seperti halnya penyediaan sarana dan prasarana didalam pasar masih sangat kurang untuk menunjang aktifitas didalam pasar, masih terdapat pedagang-pedagang yang berjualan dipinggiran pasar sehingga membuat keberadaan pasar

makin tidak teratur dan tidak tertata dengan rapi. Selain itu kebersihan pasar masih kurang dimana di beberapa pasar masih banyak sampah-sampah pedagang tradisional berserakan dan menumpuk disekitar pasar.

Ketiga, belum maksimalnya Pemerintah dan dinas-dinas yang terkait melakukan pemberdayaan kepada pedagang Tradisional, padahal yang menjadi alasan terhambatnya melakukan penataan pasar Tradisional adalah Sumber Daya Manusia, namun hingga saat ini program pemberdayaan kepada pedagang belum berjalan dengan optimal dan itu akan terus menjadi hambatan dalam melakukan penataan pasar-pasar di Kabupaten Jepara. Keempat, tidak adanya perlindungan kepada pasar tradisional dengan hadirnya pasar modern yang semakin banyak, yang dimana keberadaannya membuat pedagang-pedagang pasar tradisional.

Berdasarkan faktor-faktor diatas bisa terlihat bahwa penataan pada pasar Tradisional di Kabupaten Jepara masih sangat kurang sehingga keberadaan pasar Tradisional tidak memiliki dampak yang begitu besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Rata-Rata pertahun yang didapatkan dari Retribusi Pasar hanya sekitar 2,04 % saja sedangkan jika kita melihat pembelajaran dari Kota Surakarta yang sudah dilakukan penataan di 30 Pasar Tradisional terlihat jelas bahwa memiliki dampak yang besar terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surakarta dimana yang awalnya belum dilakukan penataan hanya mendapatkan sekitar 7,8 milyar dan sekarang menjadi 19-20 milyar pertahun.

Dari hal diatas dapat kita simpulkan bahwa jika pasar Tradisional dilakukan penataan dengan baik maka akan memiliki dampak yang besar tidak

hanya peningkatan PAD saja namun pedagang-pedagang tradisionalpun merasa diperhatikan keberadaanya sehingga mereka mampu menjualkan dagangnya dengan kondisi pasar yang nyaman dan tertata ,tidak hanya pedagang namun seluruh masyarakat juga akan merasa lebih baik berbelanja ke pasar Tradisional dibandingkan kepada Pasar Modern yang jelas harganya lebih mahal dibandingkan dengan Pasar Tradisional. Pada dasarnya hanya mengubah konsep pasar Tradisional yang dulunya terkesan kumuh menjadi Pasar Tradisional yang bersifat modern dan lebih kreatif.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Basrowi, Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta
- Dunn, Wiliam N, 2009. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua*. Yogyakarta: Gajahmada University Press.
- Indiahono, Dwiyanto. 2009. *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analisis*. Yogyakarta : Gava Media Yogyakarta
- Moleong, Lexy. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Nawawi, Ismail. 2009. *Public Policy; Analisis, Strategi Advokasi Teori dan Praktek*. Surabaya: CV. Putra Media Nusantara
- Subarsono, AG. 2006. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Analisis*. Yogyakarta: Pustaka Belajar
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Penerbit Alfabeta
- Suryabrata, Sumadi. 2011. *Metode Penelitian*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Syarif, Pipin dan Dedah Jubaedah. 2006. *Pemerintahan Daerah di Indonesia di Lengkapi Undang-Undang Nomer 32 Tahun 2004*. Bandung. CV Pustaka Setia
- Widodo, Joko. 2011. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang: Banyuwangi Publishing
- Winarno, Budi. 2007. *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Jakarta: PT Buku Kita
- Agus, Erwan. 2012. *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta. Gava Media Yogyakarta

Dokumen :

- Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern di Kabupaten Jepara
- Jepara dalam Angka 2014
- Dinas Pengelolaan Pasar Surakarta. Revialisasi Pasar Tradisional Solo.
- Rencana Strategis Kabupaten Jepara Tahun 2012 -2017
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Jepara Tahun 2012-2017